

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peningkatan populasi penduduk menjadi masalah umum yang hampir terjadi pada seluruh negara berkembang khususnya Indonesia. Menurut Sandiaga (2019) dalam satu dasawarsa terakhir populasi penduduk di Indonesia bertambah hingga 30%, dan saat ini jumlah penduduk Indonesia secara agregat menembus diatas 200 juta orang. Pertambahan jumlah penduduk memang menunjukkan semakin tingginya angka kelahiran hidup serta meningkatnya tindakan migrasi baik yang bersifat seumur hidup atau pun eksternal pada setiap daerah di Indonesia.

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari suatu wilayah kewilayah lain (Todaro, 2013). Jika perpindahan yang terjadi masih dalam batas satu negara menunjukkan migrasi yang terjadi bersifat seumur hidup. Ketika terjadi migrasi seumur hidup maka akan terjadi penambahan penduduk disuatu daerah, disamping itu kepadatan jumlah penduduk di suatu daerah juga semakin meningkat. Walaupun migrasi hanya bersifat seumur hidup, akan tetapi penambahan jumlah penduduk disuatu daerah tentu akan menciptakan berbagai masalah bagi pemerintah daerah.

Salah satu permasalahan yang terjadi ketika terjadi penumpukan migrasi seumur hidup disuatu daerah adalah meningkatnya risiko terjadinya penyakit masyarakat seperti pengangguran, kemiskinan, hingga meningkatnya tingkat kriminalitas. Pulau Sumatera merupakan salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat migrasi tertinggi. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional diketahui perkembangan migrasi seumur hidup pada sepuluh provinsi di Sumatera Barat terlihat pada Tabel 1.1 di bawah ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Migrasi Masuk Seumur hidup Provinsi di Pulau Sumatera
Tahun 2015 – 2020 Dalam Satuan Jiwa

No	Nama Provinsi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	158.921	179.349	206.693	212.693	213.128	256.717
2	Sumatera Utara	473.251	455.251	523.423	594.955	595.359	635.786
3	Sumatera Barat	313.767	335.251	405.862	401.614	402.359	476.997
4	Riau	1.768.780	1.818.620	2.025.571	2.041.781	2.044.664	2.333.371
5	Jambi	668.625	661.193	706.016	697.839	699.745	890.866
6	Sumatera Selatan	927.953	873.760	920.163	1.015.662	1.016.815	1.132.246
7	Bengkulu	300.679	327.589	347.659	360.889	362.767	551.544
8	Lampung	1.339.295	1.354.941	1.327.339	1.422.724	1.424.387	1.590.881

9	Kepulauan Bangka Belitung	172.484	190.750	228.717	214.265	215.741	364.358
10	Kepulauan Riau	805.458	834.207	913.077	922.154	926.796	1.393.333

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Pada Tabel 1.1 terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 yang lalu terjadi peningkatan jumlah migrasi seumur hidup pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera. Daerah dengan jumlah migrasi masuk tertinggi adalah Provinsi Riau dimana pada tahun 2020 jumlah migrasi masuk seumur hidup menuju Provinsi Riau berjumlah 2.333.371 jiwa, sedangkan Provinsi Aceh merupakan provinsi di Pulau Sumatera dengan jumlah migrasi masuk seumur hidup paling rendah. Walaupun demikian meningkatnya jumlah migrasi seumur hidup pada setiap provinsi di Pulau Sumatera akan meningkatkan berbagai masalah sosial, oleh sebab itu penting bagi peneliti untuk mencoba mengamati sejumlah variabel yang dapat mempengaruhi jumlah migrasi seumur hidup khususnya pada seluruh provinsi di Pulau Sumatera.

Menurut Andias, (2014) migrasi seumur hidup dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yaitu pendapat sebuah daerah, tingkat upah, tingkat pendidikan dan fasilitas publik yang dimiliki sebuah daerah. Ketika pendapatan, tingkat upah, tingkat pendidikan dan fasilitas publik pada suatu daerah berkembang maka akan mendorong meningkatnya jumlah migrasi seumur hidup. Selain itu menurut Husnah, (2019) terjadinya migrasi di sebuah daerah dapat dipengaruhi oleh pendapatan, upah minimum dan pendidikan di sebuah daerah. Masing masing variabel dapat menjadi pemicu meningkatnya jumlah migrasi seumur hidup pada sebuah daerah di Indonesia.

Pendapatan daerah menjadi salah satu daya tarik bagi masyarakat untuk bermigrasi ke sebuah daerah, ketika pendapatan sebuah daerah meningkat, menunjukkan telah terjadinya kemajuan ekonomi pada sebuah daerah sehingga diyakini akan memberikan banyak kesempatan bekerja bagi masyarakat (Pangaribuan dan Handayani, 2013), Meningkat atau menurunnya pendapatan sebuah daerah dapat diamati dari product domestic regional bruto (PDRB) yang dimiliki daerah

Menurut Sukirno (2015) *product domestic regional bruto* adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di sebuah daerah. Semakin tinggi PDRB yang dimiliki sebuah daerah menunjukkan semakin besar pendapatan yang diperoleh masyarakat di sebuah daerah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Nasional diperoleh perkembangan PDRB dapat di lihat dari pertumbuhan ekonomi provinsi di Sumatera seperti terlihat pada Tabel 1.2 di bawah ini

Tabel 1.2
Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Harga Konstan 2010
Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015 – 2020 Dalam Satuan Persentase

No	Nama Provinsi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	-2.61	1.38	3.79	3.93	3.45	4.16
2	Sumatera Utara	3.81	3.94	3.95	4.06	3.61	3.86
3	Sumatera Barat	4.23	4	4.07	3.95	3.14	3.72
4	Riau	-2.24	-0.28	0.24	-0.01	2.51	2.86
5	Jambi	2.44	2.65	2.93	3.07	4.49	5.72
6	Sumatera Selatan	2.98	3.65	4.16	4.70	4.11	4.58
7	Bengkulu	3.44	3.63	3.38	3.42	4.49	6.83
8	Lampung	3.95	4.01	4.09	4.21	4.18	4.67
9	Kepulauan Bangka Belitung	1.89	1.95	2.35	2.37	3.95	6.67
10	Kepulauan Riau	3.03	2.12	-0.69	1.83	-0.08	-0.12

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Tabel 1.2 terlihat masing-masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki nilai *product domestic regional bruto* yang relatif berbeda beda antara satu dengan yang lain. Dari data terlihat Provinsi dengan Pertumbuhan tertinggi dimiliki oleh Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 dengan laju pertumbuhan mencapai 4.70%, sedangkan pertumbuhan rendah terjadi pada Provinsi Aceh di tahun 2015 dengan penurunan mencapai 2.61%. Laju pertumbuhan diyakini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi masuk pada provinsi di Pulau Sumatera, karena laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, akan menunjukkan adanya jaminan lapangan pekerjaan dan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih layak.

Beberapa penelitian yang meneliti pengaruh pendapatan daerah terhadap migrasi seumur hidup telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dimasa lalu, hal tersebut terlihat pada hasil penelitian/Pangaribuan dan Handayani, (2013) yang menemukan pendapatan daerah berpengaruh terhadap migrasi seumur hidup, temuan yang konsisten diperoleh oleh Husnah, (2019) yang

menemukan bahwa pendapatan daerah yang diukur dengan PDRB berpengaruh positif terhadap migrasi seumur hidup. Selanjutnya hasil penelitian Andias, (2014) menemukan hasil yang berbeda dimana pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Indonesia.

Disamping pendapatan daerah, salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya perpindahan penduduk antar daerah (seumur hidup) juga dipengaruhi besarnya Upah Minimum Provinsi. Ketika tingkat upah minimum provinsi yang dimiliki sebuah daerah semakin tinggi maka daya tarik daerah tersebut untuk dijadikan tempat bermigrasi semakin tinggi. Dalam pandangan masyarakat yang melakukan migrasi antar provinsi. Ketika upah minimum yang dimiliki daerah semakin tinggi, maka akan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Nasional terlihat masing masing provinsi di Pulau Sumatera memiliki perbedaan nilai upah minimum provinsi yang berbeda, seperti terlihat pada Tabel 1.3 di bawah ini:

Tabel 1.3

UMP (Upah Minimum Provinsi) Provinsi di Sumatera Tahun 2015 – 2020 Dalam satuan Rupiah

No	Nama Provinsi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	1.900.000	2.118.500	2.225.000	2.425.000	2.550.000	3.165.031
2	Sumatera Utara	1.625.000	1.811.875	1.750.000	1.950.000	2.125.000	2.499.423
3	Sumatera Barat	1.615.000	1.800.725	1.925.000	2.125.000	2.250.000	2.484.041
4	Riau	1.878.000	2.095.000	2.250.000	2.450.000	2.650.000	2.888.564
5	Jambi	1.710.000	1.906.650	2.125.000	2.350.000	2.750.000	2.630.162
6	Sumatera Selatan	1.974.346	2.206.000	2.450.000	2.650.000	2.825.000	3.043.111
7	Bengkulu	1.500.000	1.605.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	2.213.604
8	Lampung	1.581.000	1.763.000	1.900.000	2.125.000	2.250.000	2.432.002
9	Kepulauan Bangka Belitung	2.100.000	2.341.500	2.250.000	2.450.000	2.850.000	3.230.024
10	Kepulauan Riau	1.954.000	2.178.710	2.225.000	2.450.000	2.650.000	3.005.460

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Tabel 1.3 terlihat bahwa setiap provinsi memiliki nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berbeda, sepanjang tahun 2015 sampai dengan 2020, upah minimum provinsi tertinggi dimiliki oleh salah satu provinsi termuda di Indonesia yaitu Kepulauan Bangka Belitung yaitu tercatat Rp 2.100.000 per orang di tahun 2015 naik secara nyata menjadi Rp 3.230.000 di tahun 2020 yang lalu, sedangkan Upah Minimum Provinsi terendah dimiliki oleh Provinsi Bengkulu yaitu Rp 1.500.000 ditahun 2015, hingga akhir tahun 2020 menjadi Rp 2.213.604 . Bagi masyarakat salah

satu pertimbangan bagi mereka untuk mencari daerah tujuan migrasi adalah daerah yang mampu memberikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang lebih tinggi, karena menggambarkan kualitas hidup yang lebih baik dibandingkan jika mereka tinggal di provinsi asal.

Hasil penelitian yang membahas pengaruh upah minimum provinsi terhadap migrasi seumur hidup telah dilakukan oleh Santoso(2018) menemukan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh positif terhadap migrasi seumur hidup di Sulawesi Selatan. Temuan yang sejalan juga diperoleh oleh Andias (2014) yang mengungkapkan semakin tinggi upah minimum provinsi maka akan semakin meningkatkan migrasi seumur hidup di daerah tersebut. Hasil penelitian yang berbeda diperoleh oleh Husnah (2019) yang menemukan upah minimum provinsi tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup antar provinsi di Indonesia.

Pendidikan merupakan pengaruh sosial yang juga mempengaruhi seseorang untuk bermigrasi, semakin maju sebuah daerah di sektor pendidikan akan mendorong meningkatnya jumlah migrasi di sebuah daerah. Menurut Todaro (2011) terdapat korelasi yang positif terhadap kesempatan memperoleh pendidikan dan migrasi. Orang yang berpendidikan tinggi cenderung lebih banyak melakukan migrasi dari pada yang pendidikannya lebih rendah. Pendidikan yang tinggi membuat seseorang lebih leluasa dalam memilih pekerjaan dan penghasilan yang diharapkan.

Pada penelitian ini pendidikan diukur dengan angka partisipasi sekolah untuk usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Digunakannya tingkat partisipasi sekolah antara umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun menunjukkan besaran persentase penduduk pada 10 provinsi di Pulau Sumatera yang mengenyam pendidikan dasar.

Berdasarkan data yang bersumber dari Badan Pusat Statistik terlihat perkembangan angka partisipasi sekolah (APS) masyarakat usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun terlihat pada Tabel 1.4 di bawah ini:

Tabel 1.4
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Usia 7 – 12 Tahun Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015 – 2020 (Persentase)

No	Nama Provinsi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	99.9	99.82	99.85	99.86	99.75	99.84
2	Sumatera Utara	99.35	99.42	99.49	99.5	99.41	99.44
3	Sumatera Barat	99.44	99.43	99.5	99.51	99.52	99.61
4	Riau	98.79	98.87	98.98	99.07	99.36	99.53
5	Jambi	99.55	99.57	99.59	99.67	99.7	99.82

6	Sumatera Selatan	99.53	99.61	99.63	99.71	99.71	99.71
7	Bengkulu	99.65	99.7	99.8	99.87	99.77	99.78
8	Lampung	99.62	99.63	99.78	99.86	99.8	99.74
9	Kepulauan Bangka Belitung	99.22	99.25	99.64	99.85	99.76	99.7
10	Kepulauan Riau	99.34	99.33	99.32	99.52	99.48	99.55

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Tabel 1.4 terlihat pendidikan masyarakat diukur dengan angka partisipasi sekolah dengan kategori umur 7 tahun sampai dengan 12 tahun. Terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan 2020 rata-rata angka partisipasi sekolah di Pulau Sumatera mencapai 99.57%. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat partisipasi sekolah tingkatan usia antara 7 tahun sampai dengan 12 tahun relative tinggi. Dari data terlihat dari tahun 2015 sampai dengan 2020 nilai tingkat partisipasi sekolah usia 7 tahun sampai 12 tahun terendah adalah sebesar 98.79% sedangkan nilai tingkat partisipasi kasar tertinggi mencapai 99.90%. Dengan demikian dapat disimpulkan tingkat partisipasi sekola usia 7 tahun sampai dengan 12 tahun relatif tinggi pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Pangaribuan dan Handayani (2013) menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap jumlah migrasi seumur hidup di Kota Semarang. Temuan yang sama juga diungkapkan oleh Atmani et al., (2021) menemukan bahwa semakin tinggi standar pendidikan di sebuah daerah akan semakin meningkatkan jumlah migrasi seumur hidup di seluruh provinsi di Indonesia. Temuan yang berbeda juga diperoleh oleh Andias (2014) yang menemukan bahwa faktor pendidikan tidak berpengaruh terhadap perubahan jumlah migrasi seumur hidup di sebuah daerah.

Disamping pendapatan, upah minimum provinsi dan pendidikan salah satu faktor yang juga mempengaruhi terjadinya migrasi seumur hidup antar daerah di Sumatera adalah kelengkapan fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Fasilitas tersebut seperti sekolah, rumah sakit, hingga fasilitas kesehatan. Diantara sekian banyak fasilitas tersebut fasilitas kesehatan merupakan yang terpenting, dan menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat untuk melakukan migrasi seumur hidup. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa terdapat perbedaan kelengkapan fasilitas publik di provinsi di Pulau Sumatera seperti yang terlihat pada Tabel 5 di bawah ini:

Tabel 1.5

Perkembangan Fasilitas Publik (Puskesmas dan Rumah Sakit) Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2015 – 2020 (Unit)

No	Nama Provinsi						
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Aceh	658	408	511	514	514	429
2	Sumatera Utara	4385	766	1674	1751	1751	828
3	Sumatera Barat	1496	331	576	573	573	355
4	Riau	1891	285	443	449	449	305
5	Jambi	780	217	368	373	373	249
6	Sumatera Selatan	1081	387	637	646	646	429
7	Bengkulu	458	201	267	262	262	203
8	Lampung	1031	356	649	954	954	392
9	Kepulauan Bangka Belitung	520	79	148	852	852	89
10	Kepulauan Riau	1136	101	338	1070	1070	124

Sumber: Badan Pusat Statistik (2021)

Berdasarkan Tabel 1.5 terlihat terdapat perbedaan fasilitas kesehatan umum yang terdiri dari puskesmas dan rumah sakit pada sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, jika diamati dari data terlihat Provinsi Sumatera Utara memiliki fasilitas kesehatan yang paling banyak dibandingkan sejumlah provinsi di Pulau Sumatera, sedangkan provinsi dengan jumlah rumah sakit paling sedikit adalah Kepulauan Bangka Belitung yang hingga tahun 2020 hanya memiliki 89 puskesmas dan rumah sakit. Dari data tersebut terlihat bahwa perbedaan fasilitas kesehatan diduga akan mempengaruhi jumlah migrasi seumur hidup pada provinsi di Sumatera. Dalam hal ini perkembangan yang paling unik terjadi di Provinsi Bangka Belitung dimana fasilitas kesehatan di dominasi oleh klinik dan puskesmas. tercatat di tahun 2020 hanya tersedia 89 layanan kesehatan yang tersebar di daerah tersebut. Kondisi tersebut disebabkan banyak puskesmas dan layanan kesehatan di Bangka Belitung yang tutup sepanjang 2020, khususnya klinik umum dan bersalin, selain itu ditahun tersebut pemerintah Kabupaten Bangka Belitung lebih menargetkan membangun rumah sakit dengan fasilitas yang lengkap di beberapa titik pada wilayah Bangka Belitung, guna menekan laju pandemi dan adanya risiko pandemi lainnya pada saat ini atau pun masa mendatang. Perbedaan fasilitas publik tersebut mendorong munculnya keinginan masyarakat melakukan migrasi.

Sejumlah hasil penelitian yang membahas pengaruh fasilitas publik terhadap migrasi seumur hidup telah dilakukan oleh Andias, (2014) yang menemukan bahwa fasilitas umum berpengaruh positif terhadap migrasi seumur hidup. Hasil penelitian yang konsisten diperoleh oleh Husnah(2019) yang menemukan bahwa fasilitas publik yang semakin lengkap akan meningkatkan jumlah migrasi seumur hidup di sejumlah provinsi di Indonesia. Temuan yang berbeda diperoleh

oleh Sari et al., (2020) yang menemukan bahwa fasilitas publik tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Jawa.

Berdasarkan uraian fenomena, serta pro dan kontra hasil penelitian, peneliti tertarik kembali untuk mencoba melakukan penelitian yang membahas sejumlah faktor faktor yang mempengaruhi migrasi seumur hidup khususnya pada provinsi di Pulau Sumatera. Penelitian ini memiliki sejumlah perbedaan dengan penelitian sebelumnya, perbedaan pertama adalah pemilihan objek penelitian berbeda dengan peneliti sebelumnya, tahun penelitian yang lebih update, serta metode analisis yang berbeda. Secara umum penelitian ini berjudul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Upah, Pendidikan dan Fasilitas Publik Terhadap Migrasi Seumur hidup di Pulau Sumatera.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka dalam penelitian ini permasalahan yang dapat penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera ?
2. Apakah tingkat upah berpengaruh terhadap terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera ?
3. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera ?
4. Apakah fasilitas publik berpengaruh terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diutarakan diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tingkat upah terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pendidikan terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh fasilitas publik terhadap migrasi seumur hidup di Pulau Sumatera.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis, tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Ekonomi (S1) pada Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta serta untuk menambah wawasan penulis dalam pembuatan karya ilmiah.
2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan yaitu Ilmu Ekonomi khususnya untuk mengetahui sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya migrasi seumur hidup pada sepuluh provinsi di Pulau Sumatera.
3. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Provinsi dalam merumuskan suatu kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat yang melakukan migrasi seumur hidup. Dan Sebagai acuan Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna semua pihak.